

## **BAB II**

### **GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Kementerian Agama Provinsi Jambi**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut menjadi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional di jiwai, digerakan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan.

Secara historis benang merah nafas keagamaan tersebut dapat ditelusuri sejak abad V Masehi, dengan berdirinya kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di Kalimantan melekat pada kerajaan-kerajaan di pulau

Jawa, antara lain kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan kerajaan Purnawarman di Jawa Tengah.

Pada abad VIII corak agama Budha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya yang pengaruhnya cukup luas sampai ke Sri Lanka, Thailand dan India. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, candi Borobudur dibangun sebagai lambang kejayaan agama Budha. Pemerintah kerajaan Sriwijaya juga membangun sekolah tinggi agama Budha di Palembang yang menjadi pusat studi agama Budha se-Asia Tenggara pada masa itu. Bahkan beberapa siswa dari Tiongkok yang ingin memperdalam agama Budha lebih dahulu beberapa tahun membekali pengetahuan awal di Palembang sebelum melanjutkannya ke India.

Menurut salah satu sumber Islam mulai memasuki Indonesia sejak abad VII melalui para pedagang Arab yang telah lama berhubungan dagang dengan kepulauan Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang di jazirah Arab. Agama Islam tersiar secara hampir merata di seluruh kepulauan nusantara seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Demak, Pajang dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, kerajaan Tidore dan Ternate di Maluku, kerajaan Banjar di Kalimantan, dan lain-lain.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda banyak raja dan kalangan bangsawan yang bangkit menentang penjajah. Mereka tercatat sebagai pahlawan bangsa, seperti Sultan Iskandar

Muda, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Panglima Polim, Sultan Agung Mataram, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Sultan Goa, Sultan Ternate, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Pola pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut diatas pada umumnya selalu memiliki dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

Fungsi pemerintahan umum, hal ini tercermin pada gelar “Sampean Dalem Hingkang Sinuhun” sebagai pelaksana fungsi pemerintahan umum. Fungsi pemimpin keagamaan tercermin pada gelar “Sayidin Panatagama Kalifatulah.” Fungsi keamanan dan pertahanan, tercermin dalam gelar raja “Senopati Hing Ngalogo.” Pada masa penjajahan Belanda sejak abad XVI sampai pertengahan abad XX pemerintahan Hindia Belanda juga “mengatur” pelayanan kehidupan beragama.

Tentu saja pelayanan keagamaan tersebut tak terlepas dari kepentingan strategi kolonialisme Belanda. Dr.C. Snuck Hurgronye, seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam bukunya “Nederland en de Islam” (Brill, Lei-den 1911) menyarankan sebagai berikut: “Sesungguhnya menurut prinsip yang tepat, campur tangan pemerintah dalam bidang agama adalah salah, namun jangan dilupakan bahwa dalam sistem tata negara Islam terdapat sejumlah permasalahan yang tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan agama yang bagi suatu pemerintahan yang baik, sama sekali tidak boleh lalai untuk mengaturnya.

Pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda di bidang agama adalah sebagai berikut: Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup

dan kedaulatan organisasi agama dan gereja, tetapi harus ada izin bagi guru agama, pendeta dan petugas misi/zending dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu. Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani, semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan perigawasanya kepada para raja, bupati dan kepala bumi putera lainnya. Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan oleh beberapa instansi di pusat yaitu:

Soal peribadatan umum, terutama bagi golongan Nasrani menjadi wewenang Departement van Onderwijs en Eeredienst (Departemen Pengajaran dan Ibadah). Soal pengangkatan pejabat agama penduduk pribumi, soal perkawinan, kemasjidan, haji, dan lain lain, menjadi urusan Departement van Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri). Soal Mahkamah Islam Tinggi atau Hofd voor Islamietische Zaken menjadi wewenang Departement van Justitie (Departemen Kehakiman). Pada masa penjajahan Jepang kondisi tersebut pada dasarnya tidak berubah. Pemerintah Jepang membentuk Shumubu, yaitu kantor agama pusat yang berfungsi sama dengan Kantor voor Islamietische Zaken dan mendirikan Shumuka, kantor agama karesidenan, dengan menempatkan tokoh pergerakan Islam sebagai pemimpin kantor.

Penempatan tokoh pergerakan Islam tersebut merupakan strategi Jepang untuk menarik simpati umat Islam agar mendukung cita-cita persemakmuran Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon. Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan

berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuankemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 2.

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Panca-sila dan UUD 1945.

Kemudian melihat perkembangan Kementerian Agama Provinsi Jambi dan dimulai pada tahun 1973 dibawah pimpinan K.H Muktar Rasyid sampai pada tahun 1976. Dan kemudian mengalami pergantian kepemimpinan Kemenag Provinsi Jambi dari tahun 1977 sampai 1981 dengan pimpinan Drs. H. Munir, SA. Setelah itu pada tahun 1982 sampai 1987 Kemenag Provinsi Jambi dipimpin oleh Drs. H. Bahtiar ilyas kemudian pada tahun 1987 sampai 1990 kepemimpinan Kementerian Agama Provinsi Jambi dipimpin oleh Drs. H. Musta'in. perubahan kepemimpinan selanjutnya yaitu pada tahun 1990 sampai 1997 oleh Drs. H. Saleh Bina, setelah itu pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 Kementerian Agama Provinsi Jambi dipimpin oleh Drs. H. Rafi'i salim, selanjutnya di tahun 2002 sampai dengan 2006 kepala Kementerian Agama Provinsi Jambi diketuai oleh Drs. H.M. Idris saleh, setelah itu pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 kepala kantor Kemenag Provinsi Jambi diketuai oleh Drs. H. Abdul kadir Husein, M.Pd.I, dan pada tahun 2012 mengalami pergantian dengan periode waktu yang singkat, pada tahun 2012 ini ketua kantor Kemenag Provinsi Jambi dipimpin oleh DR. H.Marwazi dan ditengah tahun 2012 pergantian kepala kantor Kemenag Provinsi Jambi diganti oleh Drs. H. Mahbub Daryanto,M.Pd.I periode waktu 2012 sampai dengan 6 januari 2015. Setelah itu mengalami pergantian kepemimpinan Kementerian Agama Provinsi Jambi pada tahun 2015 sampai dengan sekarang dibawah pimpinan Drs. H.M Thahir M.HI.

Data dari sejarah Kementerian Agama Provinsi Jambi ini bersumber dari website, dan dokumen humas Kemenag Provinsi Jambi tahun 2016. Berikut tampilan website resmi Kemenag Provinsi Jambi



Gambar 2.1: Tampilan Website resmi Kemenag Prov.Jambi

(Sumber: Dokumen Kemenag Provinsi Jambi)

## B. Visi Misi Kementerian Agama Provinsi Jambi

### 1. Visi

Terwujudnya masyarakat Jambi yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam berkepribadian berlandaskan gotong royong.

### 2. Misi

- a) Meningkatkan pemahaman Kehidupan Beragama.
- b) Memantapkan Kerukunan intra dan antar Umat Beragama.
- c) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- d) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

- e) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- f) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- g) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

(sumber:Humas Kemenag Provinsi Jambi)

### C. Makna Logo Kementerian Agama Provinsi Jambi



1. Isi lambang Kementerian Agama adalah :
  - a) Bintang terletak di ujung pertemuan tangkai padi dan kapas.
  - b) Tangkai kapas dan padi yang melingkar terdapat 17 kuntum bunga kapas dan 45 butir padi.
  - c) Delapan baris tulisan pada dua permukaan lembaran kitab suci.
  - d) Kitab suci di atas alas terletak di tengah-tengah lambang.

- e) Semboyan “Ikhlas Beramal” ditulis dalam pita di bawah kitab suci.

2. Warna Lambang Kementerian Agama :

- a) Dasar berwarna hijau tua
- b) Bintang berwarna kuning emas
- c) Bunga kapas berwarna hijau putih
- d) Delapan baris tulisan dalam kitab suci berwarna hitam
- e) Padi berwarna kuning emas
- f) Kitab suci berwarna kuning emas
- g) Alas kitab suci berwarna hitam
- h) Kalimat “Ikhlas Beramal” berwarna hitam
- i) Pita berwarna hitam (ganti putih, KMA No. 43/1982)
- j) Perisai segi lima sama sisi berwarna kuning

3. Makna warna-warni dalam Lambang

- a) Bintang bersudut lima yang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, bermakna bahwa karyawan Kementerian Agama selalu menta’ati dan menjunjung tinggi norma-norma agama dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- b) 17 kuntum bunga kapas, 8 butir tulisan dalam kitab suci dan 45 butir padi bermakna Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. Menunjukkan kebulatan tekad para Karyawan Kementerian Agama untuk membela Kemerdekaan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

- c) Butiran padi dan kapas yang melingkar berbentuk bulatan bermakna bahwa Karyawan Kementerian Agama mengemban tugas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata.
- d) Kitab suci bermakna bahwa pedoman hidup dan kehidupan yang serasi antara kebahagiaan duniawi dan ukhrowi, materiil, dan spirituil dengan ridho Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.
- e) Alas kitab suci bermakna bahwa pedoman hidup dan kehidupan harus ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan potensi dinamis dari kitab suci.
- f) Kalimat “Ikhlas Beramal” bermakna bahwa Karyawan Kementerian Agama dalam mengabdikan kepada masyarakat dan Negara berlandaskan niat beribadah dengan tulus dan ikhlas.
- g) Perisai yang berbentuk segi lima sama sisi dimaksudkan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dilindungi sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.
- h) Kelengkapan makna lambang Kementerian Agama melukiskan Motto : “Dengan iman yang teguh dan hati yang suci serta menghayati dan mengamalkan Pancasila yang merupakan tuntutan dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat

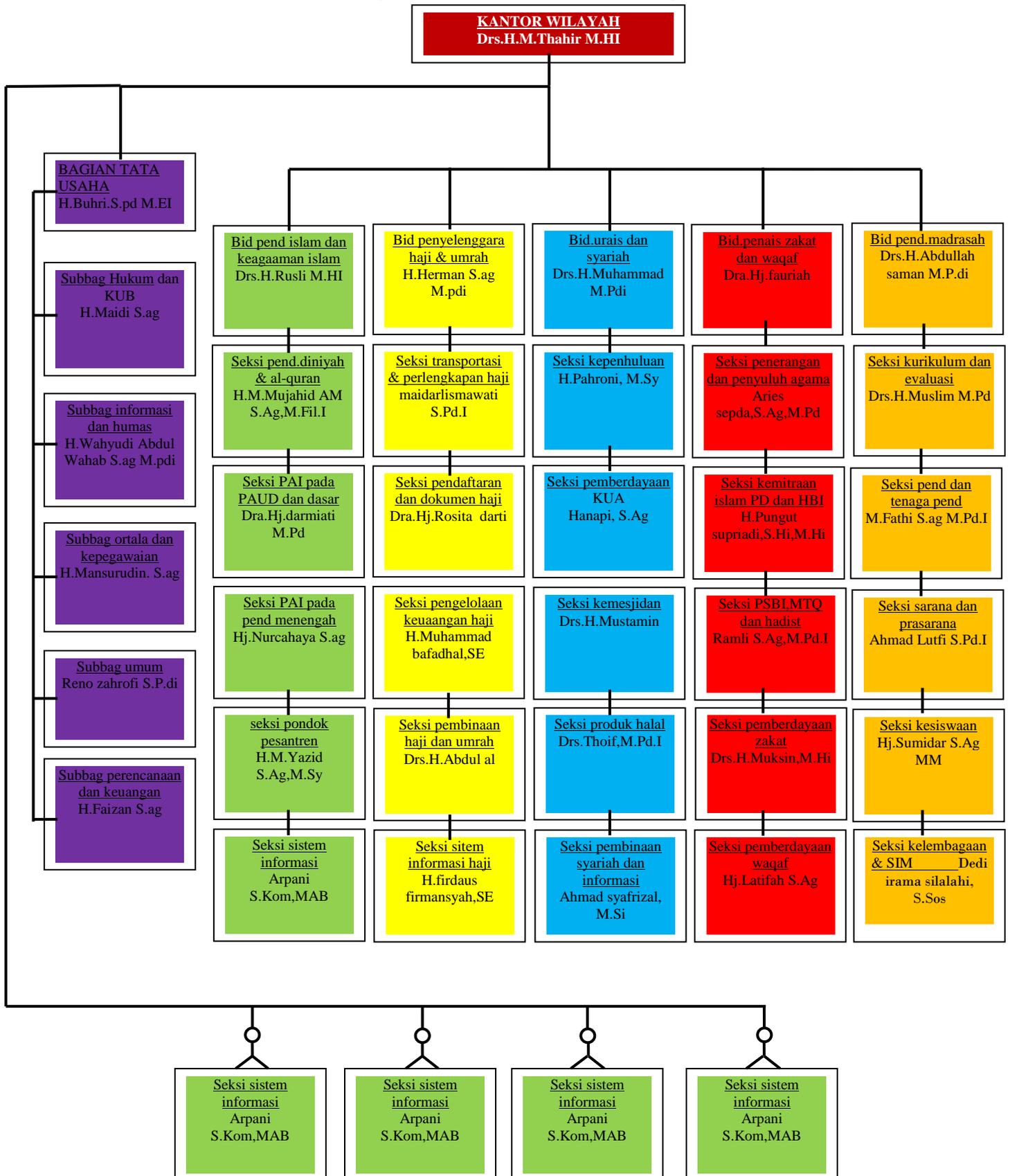
dan bernegara, Karyawan Kementerian Agama bertekad bahwa mengabdikan kepada Negara adalah ibadah.

#### **D. Struktur Organisasi Kementerian Agama Provinsi Jambi**

Dalam rangka melaksanakan tugas di instansi, sangat diperlukan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka dan susunan perwujudan pola hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, dan orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu instansi atau organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur sentralisasi kerja atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan kerja melalui bagan organisasi akan terlihat jelas bagaimana informasi mengalir dari satuan organisasi ke satuan organisasi lainnya, juga memberikan petunjuk tentang pembagian tugas, luasnya rentangan kekuasaan/kendali, wewenang dan tanggung jawab.

Oleh karenanya setiap karyawan harus muthlak untuk memahami struktur organisasi di tempat kerja. Melihat struktur organisasi di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, dapat dilihat bahwa struktur organisasi yang digunakan adalah bentuk organisasi garis (line), pelimpahan tanggung jawab dan pendelegasian tugas disusun dalam 10 aliran kerja yang teratur dari level paling atas hingga pada tingkat karyawan. Berikut ini adalah gambaran struktur organisasi di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi

# 1. Struktur Organisasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi



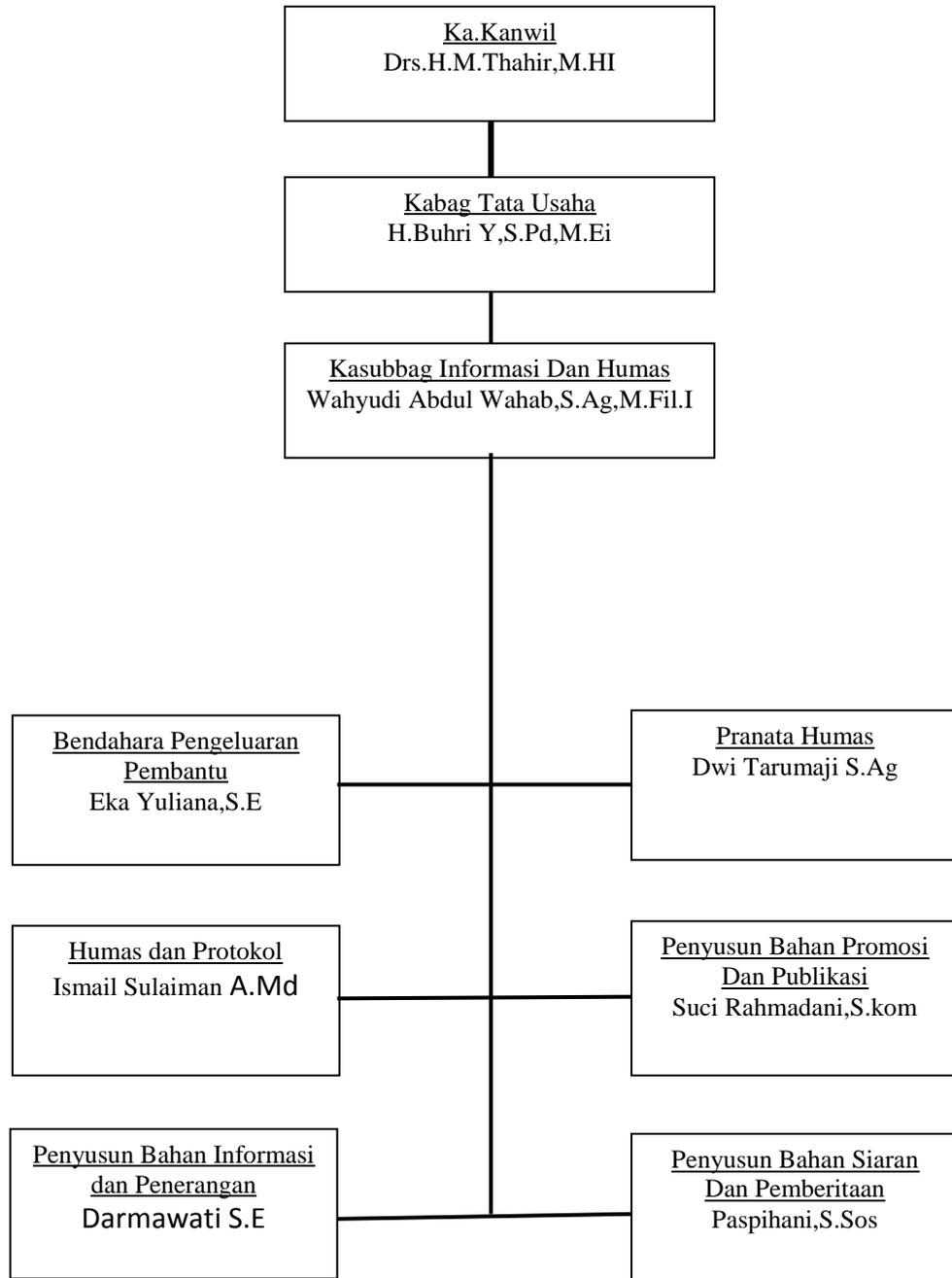
#### **E. Deskripsi di Humas Kementerian Agama Provinsi Jambi**

Humas di Kemenag Provinsi Jambi ini keberadaannya mulai menjadi struktur pada tahun 1980 yang berada dibawah bagian tata usaha, kemudian dalam proses pelaksanaan humas Kemenag Provinsi Jambi mengalami beberapa kali perubahan yang pertama yaitu humas, dan perubahan yang kedua dinamakan hubmas & KUB, dan yang ketiga inmas ( informasi dan hubungan masyarakat). Di Kemenag Provinsi Jambi dalam kepemimpinan humas nya telah mengalami Sembilan kali pergantian kasubbag yang melaksanakan tugas-tugas di humas Kemenag Provinsi Jambi dan yang pertama pada tahun 1980 sampai dengan 1987 humas Kemenag Provinsi Jambi diketuai oleh Usman Naim PA, kemudian pada tahun 1987 sampai tahun 1996 dipimpin oleh Drs. Ahmad Madani, setelah itu dari tahun 1996 sampai dengan 2001 di ketuai oleh Drs. Damiati.

Selanjutnya pada tahun 2001 sampai dengan 2003 humas Kemenag Provinsi Jambi dipimpin oleh Drs. Taurus Marsudi, setelah itu pada tahun 2003 sampai pada tahun 2005 dipimpin oleh Drs.H.Umar Yusuf, kemudian pada tahun 2005 sampai pada tahun 2007 diketuai oleh Drs. Musarta, kemudian di tahun 2007 sampai 2009 dipimpin oleh M. Yahya Damani Wa, selanjutnya pada tahun 2009 sampai dengan 2012 dipimpin oleh Drs.M.Sayuti, dan yang terakhir pada tahun 2012 sampai dengan sekarang humas Kemenag Provinsi Jambi dipimpin oleh H.Wahyudi Abdul Wahab. Dan berikut struktur organisasi bagian humas Kemenag Provinsi Jambi pada tahun 2016

## 2. Struktur Organisasi Subbag Informasi Dan Humas Kanwil

### Kementrian Agama Provinsi Jambi



## **F. Tugas dan unit kerja Kementerian Agama Provinsi Jambi**

### **1. Tugas Bagian Tata Usaha**

Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Susunan Organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas

- a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- b) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian
- c) Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama
- d) Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat
- e) Subbagian Umum

### **2. Tugas Bidang Pendidikan Madrasah**

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Susunan Organisasi Bidang Pendidikan Madrasah terdiri atas

- a) Seksi Kurikulum dan Evaluasi
- b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c) Seksi Sarana dan Prasarana
- d) Seksi Kesiswaan
- e) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah

### **3. Tugas Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren**

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Susunan Organisasi Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren terdiri atas

- a) Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah
- b) Seksi Pendidikan Diniyah Formal dan Kesetaraan
- c) Seksi Pondok Pesantren
- d) Seksi Pendidikan Al-Qura'an
- e) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

### **4. Tugas Bidang Pendidikan Agama Islam**

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Susunan Organisasi Bidang Pendidikan Agama Islam terdiri atas

- a) Seksi Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan TK
- b) Seksi Pendidikan Agama Islam pada SD/SDLB
- c) Seksi Pendidikan Agama Islam pada SMP/SMPLB
- d) Seksi Pendidikan Agama Islam pada SMA/SMALB/SMK
- e) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama Islam

## **5. Tugas Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah**

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Susunan Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri:

- a) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji
- b) Seksi Pembinaan Haji dan Umrah
- c) Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji
- d) Seksi Pengelolaan Keuangan Haji
- e) Seksi Sistem Informasi Haji

## **6. Tugas Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf**

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan serta pengelolaan sistem informasi di bidang penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Susunan Organisasi Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf terdiri atas:

- a) Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam
- b) Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Agama Islam
- c) Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadist.

- d) Seksi Pemberdayaan Zakat
- e) Seksi Pemberdayaan Wakaf;

**7. Pembimbing Masyarakat Kristen**

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

**8. Pembimbing Masyarakat Katolik**

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

**9. Pembimbing Masyarakat Hindu**

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

**10. Pembimbing Masyarakat Hindu**

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama